

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut , Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kota Bandung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Komprehensif dan Inovatif

Dinas Sosial Kota Bandung telah mengimplementasikan strategi yang komprehensif dalam menangani masyarakat PPKS melalui pendekatan kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Program unggulan "Desaku Menanti" berhasil menggabungkan pemberdayaan sosial dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Dusun Dandangan. Pendekatan cluster development memungkinkan setiap kelompok keahlian membentuk unit usaha tersendiri namun terintegrasi dalam satu ekosistem. Sistem rehabilitasi humanis diterapkan dengan pendekatan persuasif dan personal yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

2. Implementasi Multi-Aktor dan Dukungan Anggaran

Pelaksanaan program PPKS melibatkan sinergi antara aktor internal (tiga bidang utama: Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, serta Bantuan dan Perlindungan Sosial) dan aktor eksternal (kepolisian, Dinas Sosial Provinsi, BKD, panti sosial, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta). Pemerintah Kota Bandung menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp. 5.723.680.100 per tahun dengan alokasi untuk bantuan langsung (40%), program pelatihan (25%), dan operasional (20%). Transparansi keuangan dijaga melalui sistem pelaporan berkala dan audit internal/eksternal.

3. Pengembangan Kapasitas dan Tantangan

Organisasi terus mengembangkan kapasitas melalui program pelatihan rutin, penguatan kelembagaan, dan inovasi berkelanjutan. Namun, masih terdapat hambatan internal berupa keterbatasan pekerja sosial (hanya 5 orang), ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pegawai, kemampuan TI terbatas, dan kapasitas fasilitas belum memadai. Hambatan eksternal meliputi keterbatasan kewenangan penempatan SDM, kompleksitas masalah sosial, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

4. Evaluasi dan Dampak Program

Masyarakat penerima program memberikan apresiasi positif namun meminta penyederhanaan prosedur, kejelasan informasi, pendampingan jangka panjang, dan integrasi program pemasaran hasil keterampilan. Secara keseluruhan, program menunjukkan inovasi dan komitmen kuat, dengan "Desaku Menanti" sebagai bukti kemampuan adaptasi dan kreativitas dalam mengatasi masalah sosial.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti di atas, maka terdapat beberapa saran dalam penetapan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung, antara lain:

1. Perlu adanya anggaran yang sesuai untuk menjalankan program perwujudan kesejahteraan masyarakat PPKS, maka dari itu Dinas Sosial Kota Bandung harus mengelola anggaran dengan tepat sasaran dan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan diajukan dalam RAPBD.
2. Dinas Sosial Kota Bandung perlu melakukan pengarahannya, pelatihan dan bimbingan secara berkala kepada masyarakat PPKS guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat PPKS terhadap keterampilan/ keahlian yang akan dikembangkan sehingga masyarakat PPKS mempunyai pengetahuan yang luas dan keterampilan/ keahlian yang didapat tersebut terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Replikasi program "Desaku Menanti" di lokasi lain dengan penyesuaian potensi lokal perlu dilakukan. Digitalisasi pelayanan melalui aplikasi

mobile dan sistem online akan memudahkan akses masyarakat. Program aftercare untuk pendampingan jangka panjang pasca rehabilitasi perlu dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan kemandirian PPKS.

4. Perlu ditambahkannya personil/ tenaga kerja sosial karena jumlah personil masih sangat terbatas mengingat mereka mempunyai peran yang cukup penting dalam penetapan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung.

